



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KENAIKAN TARGET PRODUKSI ENERGI FOSIL DI TENGAH UPAYA TRANSISI ENERGI

Hilma Meilani

Analisis Legislatif Ahli Muda
hilma.meilani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan produksi dari tiga komoditas energi fosil pada tahun 2023. *Lifting* minyak bumi ditargetkan sebesar 660.000 barel per hari, naik dari 612.000 barel per hari pada tahun 2022. *Lifting* gas bumi ditargetkan sebesar 1,1 juta barel setara minyak per hari, naik dari 1,03 juta barel setara minyak per hari pada tahun 2022. Target produksi batu bara tahun ini tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu 695 juta ton, di atas realisasi tahun 2022 sebesar 687 juta ton, sedangkan kebutuhan dalam negeri 177 juta ton.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi investasi migas sepanjang tahun 2022 mencapai USD13,9 miliar, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar USD17 miliar. Sedangkan realisasi investasi sektor minerba melampaui target, yaitu mencapai USD5,6 miliar dari target USD5 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2022 mencapai Rp351 triliun atau 138% dari target Rp254 triliun. Dari angka tersebut, PNBP minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp148,7 triliun atau 106,9% di atas target Rp139,1 triliun. Sedangkan PNBP mineral dan batu bara (minerba) mencapai Rp183,4 triliun, melampaui target sebesar Rp101,8 triliun. Realisasi PNBP EBTKE sebesar Rp2,3 triliun, di atas target Rp1,6 triliun.

Energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batu bara) masih menjadi fokus pemerintah untuk dioptimalkan agar kontribusinya meningkat terhadap penerimaan negara. Hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya target investasi pada energi fosil. Investasi sektor migas tahun 2023 ditargetkan sebesar USD17,4 miliar, lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar USD13,9 miliar. Investasi sektor minerba diproyeksi naik dari USD5,6 miliar pada tahun 2022 menjadi USD7,7 miliar pada tahun ini. Sementara investasi untuk energi baru dan terbarukan (EBT) hanya ditargetkan naik dari USD1,6 miliar pada tahun 2022 menjadi USD1,8 miliar pada tahun ini.

Pemanfaatan energi fosil di tengah masyarakat juga diproyeksikan masih akan dominan pada tahun ini. Bahkan pemerintah menyediakan anggaran subsidi yang lebih besar untuk bahan bakar minyak (BBM) dan *liquefied petroleum gas* (LPG). Jika realisasi subsidi BBM dan LPG tahun lalu mencapai Rp97,8 triliun, pada tahun 2023 disediakan anggaran negara hingga Rp139,4 triliun untuk subsidi kedua komoditas energi tersebut.

Realisasi bauran energi primer EBT sepanjang tahun 2022 sebesar 14,11%, dari sebelumnya di tahun 2021 yang mencapai 13,65%. Angka tersebut di bawah target yang ditetapkan pemerintah sebesar 15,7% di tahun 2022. Bauran EBT tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan batu bara sebesar 67%. Pemerintah berupaya mendorong bauran EBT dengan rencana penambahan pembangkit sebesar 20,9 gigawatt hingga tahun 2030.

Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari energi fosil. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), pemerintah perlu

mempertimbangkan dampak jangka panjang dalam penentuan target produksi energi fosil, khususnya batu bara. Permintaan batu bara di dalam negeri dinilai masih akan terus meningkat hingga tahun 2028-2029, yang dapat mempersulit pengembangan EBT karena peningkatan permintaan tersebut berasal dari naiknya kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Saat ini peningkatan kapasitas EBT untuk mencapai target 23% dalam bauran energi nasional sudah terkendala karena pasokan berlebih PLTU di sistem PLN. Kecenderungan global pada energi bersih membuat Indonesia memiliki peluang besar mengoptimalkan kekayaan panas bumi atau geotermal secara ekonomis. Dengan pengelolaan yang tepat, panas bumi memiliki nilai manfaat yang besar sebagai *supply* energi terbaik untuk PLN.

Pemerintah bersama pelaku industri hulu, pelaku industri hilir, investor, serta para pemangku kepentingan lainnya perlu bekerja sama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional. Indonesia membutuhkan investasi besar dan teknologi rendah karbon untuk mendukung transisi energi menuju kemandirian energi nasional.

Atensi DPR

Peningkatan target produksi energi fosil dan kenaikan subsidi BBM dan LPG pada tahun 2023 di tengah upaya transisi energi perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri. Dari segi pengawasan, Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk konsisten meningkatkan bauran energi primer yang berbasis EBT, dengan melakukan investasi yang lebih besar pada sektor EBT. Dari sisi legislasi, Komisi VII DPR RI perlu memprioritaskan penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan sebagai payung hukum bagi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

Sumber

Bisnis Indonesia, 31 Januari 2023;
esdm.go.id, 31 Januari 2023; dan
Media Indonesia, 31 Januari 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.